

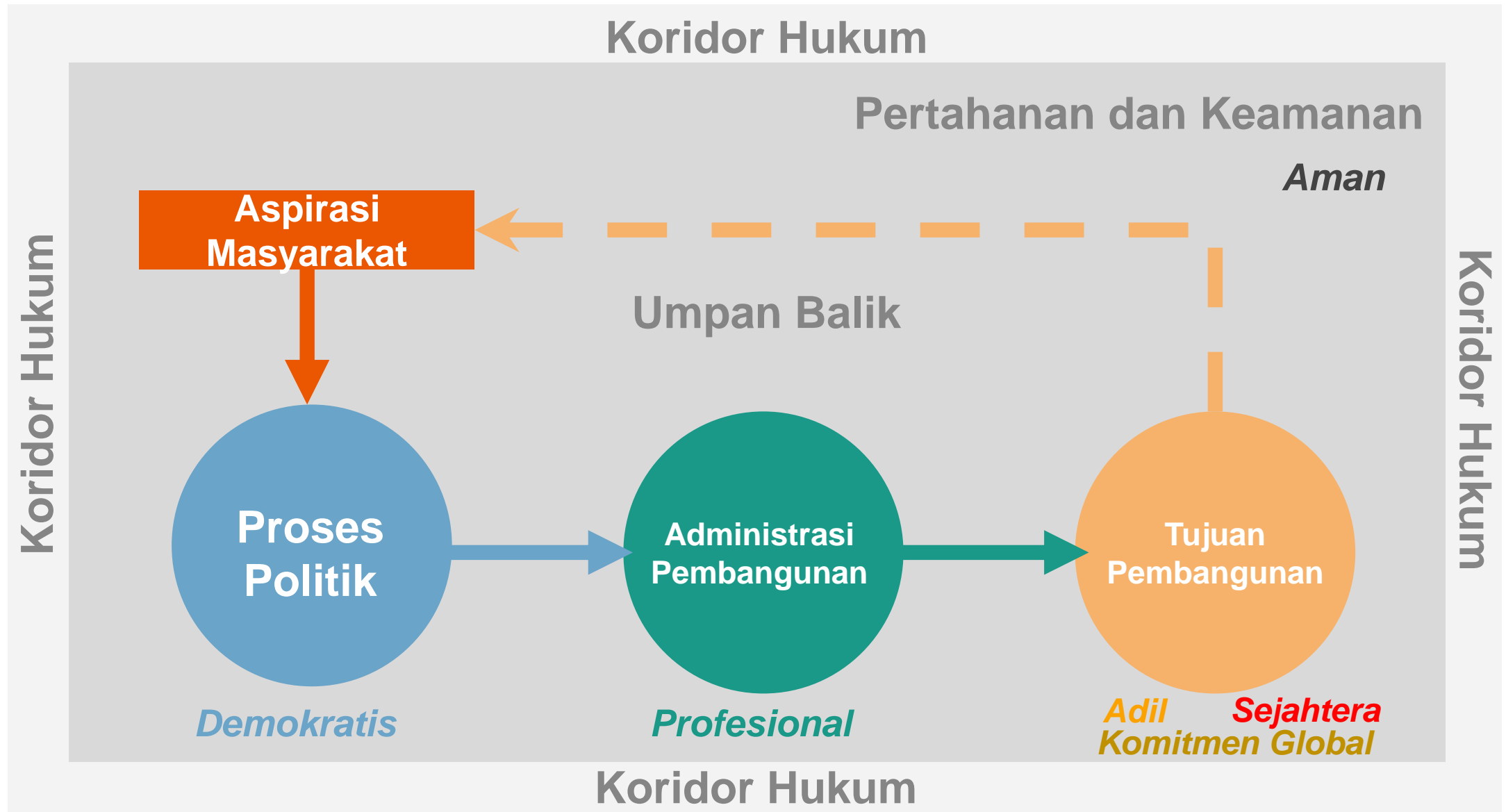


Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Jakarta, 28 November 2019

KERANGKA PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM PERTAHANAN DAN KEAMANAN



Konsolidasi Demokrasi



2019

Capaian

1. Indeks Demokrasi Indonesia **72,39**
2. Pemilu 2019 terlaksana dengan baik. Partisipasi pemilih **81%** lebih
3. Indeks Kemerdekaan Pers **73,71**
4. Terbentuknya Komisi Informasi di 33 Provinsi



2020

Program Prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi

Kegiatan Prioritas
Penataan Biaya Politik



2021

Isu Strategis

1. Politik biaya tinggi
2. Tantangan kebebasan sipil
3. Akses informasi yang belum merata dan berkeadilan

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri



2019

Capaian

1. Meningkatkan peran Indonesia di Asia, Pasifik dan Afrika melalui **pelaksanaan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID)**
2. Menguatnya diplomasi ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional → **Indonesian Aid (IndoAid)**
3. Menguatnya dukungan terhadap integritas wilayah dan stabilitas kawasan melalui **perundingan batas maritim**
4. Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri → **peningkatan nilai Indeks Pelayanan Perlindungan WNI/BHI**



2020

Program Prioritas Penguatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional

Kegiatan Prioritas

1. Penguatan Diplomasi Politik-Keamanan dan Perbatasan
2. Penguatan Perlindungan WNI di Luar Negeri
3. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional



2021

Isu Strategis

1. Tren peningkatan mobilitas WNI ke luar negeri.
2. Belum terselesaikannya batas maritim Indonesia dengan negara tetangga.
3. Pelaksanaan kerja sama pembangunan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
4. Penguatan koordinasi dan pemajuan satu visi citra Indoensia.
5. Pemanfaatan keanggotaan Indonesia dalam fora internasional.
6. Penataan kelembagaan pelaksana kebijakan luar negeri Indonesia.

Penguatan Pertahanan dan Keamanan



2019

Capaian

1. Persentase Pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) mencapai 68,9%
2. Persentase Kontribusi Industri Pertahanan mencapai 43,6%
3. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika mencapai 2,65%



2020

Program Prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan

Kegiatan Prioritas

1. Peningkatan Kekuatan Pertahanan
2. Penguatan Kemandirian Pertahanan
3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar

Program Prioritas Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas

Kegiatan Prioritas

1. Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika
2. Peningkatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban



2020

Program Prioritas Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber dan Penguatan Keamanan Laut

Kegiatan Prioritas

1. Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme
2. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber
3. Penguatan Keamanan Laut



2021

Isu Strategis

1. Kemampuan pertahanan belum mencapai MEF
2. Urgensi industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing
3. Kejahatan transnasional meliputi narkoba dan terorisme serta pelanggaran batas negara
4. Rasa aman dan pelayanan kepolisian belum sesuai harapan
5. Kejahatan dan pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia
6. Serangan dan kejahatan siber

Penegakan Hukum Nasional



2019

Capaian

1. Diklat terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak kepada 240 Aparat Penegak Hukum
2. Pemberian bantuan hukum litigasi kepada 10.174 masyarakat miskin dan 1442 kegiatan bantuan hukum non litigasi.
3. Pelaksanaan diklat terpadu pengelolaan aset hasil tipikor kepada 60 orang Aparat Penegak Hukum
4. Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban terhadap 280 korban



2020

Program Prioritas Penguatan Perbaikan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi

Kegiatan Prioritas

1. Penataan Regulasi
2. Perbaikan Peradilan Perdata untuk Kemudahan Berusaha
3. Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif
4. Optimalisasi Upaya Anti Korupsi



2021

Isu Strategis

1. Belum optimalnya tata kelola regulasi
2. *Overcrowding* rutan dan lapas
3. Belum optimalnya kontribusi bidang hukum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
4. Rendahnya peringkat aspek penegakan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan mendapatkan kredit. (EoDB Index, 2020)
5. Lemahnya dukungan teknologi informasi dalam penanganan perkara
6. Sistem anti korupsi belum optimal mencegah praktik koruptif
7. Penanganan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu

Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola



2019

Capaian

1. Terbentuknya 12 Mal pelayanan publik di daerah
2. Telah ditetapkan payung kebijakan pelaksanaan SPBE (Perpres No.95/2018)
3. Pengadaan CPNS secara transparan berbasis CAT
4. 6 instansi pemerintah telah menerapkan sistem merit dengan sangat baik
5. Opini WTP atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) selama tiga tahun
6. Inovasi pelayanan publik secara elektronik (e-services)



2020

Program Prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi

Pro PN

1. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
2. Penguatan sistem integritas dan manajemen kinerja
3. Penguatan layanan administrasi pemerintah secara elektronik



2021

Isu Strategis

1. Melanjutkan perampingan eselonisasi dan struktur birokrasi
2. Penguatan pelayanan terpadu secara online (daring) dan fisik
3. Melanjutkan percepatan implementasi SPBE dari sisi kebijakan dan infrastruktur TIK
4. Perluasan zona integritas di sektor strategis
5. Penguatan manajemen akuntabilitas kinerja dan anggaran



TERIMA KASIH